

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Dalam proposal penelitian ini, peneliti melakukan beberapa tinjauan pustaka guna melihat seberapa jauh mengenai penelitian tentang bedah rumah yang pernah dilakukan. Tujuan dari peninjauan pustaka ini adalah untuk menunjang proses dan penambahan informasi sebagai bahan rujukan.

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Judul Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1	Simson Tondo “Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Bedah Rumah”. Jurnal ilmu administrasi Negara volume 5. No. 2 oktober 2017	Dalam penelitian ini persamaan terletak pada pengentasan kemiskinan dalam bentuk bedah rumah. Kemudian dalam metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam penentuan informan. Pada penelitian Simson Tondo menggunakan <i>snowball</i> , sedangkan pada penelitian saya menggunakan <i>purposive sampel</i> .
2	Afifa Qomaria “Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto”. Jurnal manajemen dan kebijakan public volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015	Dalam penelitian ini persamaan terletak pada jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada pelaksana tugas yaitu oleh Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan penelitian saya dilaksanakan oleh BAZNAS. Selain itu
3	Isabella, Julio Sesar, dan Amaliatulwalidain “Evaluasi Program Bantuan Stimulan	Persamaan dalam penelitian ini adalah kualitatif	Perbedaan dalam penelitian ini adalah bedah

	Perumahan swadaya (Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Tahun 2014). Jurnal pemerintah dan politik volume 2 No.1 Januari 2017	deskriptif. Penelitian ini juga berdasarkan padapasal 3, undang-undang nomor 01 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman.	rumah dilakukan oleh kementerian perumahan rakyat. Selain itu penelitian ini berpijak pada evaluasi kebijakan.
4	Motic Deviano Novandric yang berjudul “Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pelaksanaan Desa Model Di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban)”. Jurnal kebijakan dan manajemen publik volume 3. No.3 desember 2015	Persamaan dalam penelitian ini adalah pengentasan kemiskinan berdasarkan <i>Millenium Development Goals</i> (MDGs). Menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini adalah dari segi bantuan. Penelitian yang dilakukan oleh Motic Deviano Novandric ini jenis bantuannya adalah seperti hewan ternak.
5	I Wayan Supriana yang berjudul “Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Penerima Bantuan Bedah Rumah Dengan Metode Pembobotan”. Jurnal ilmiah volume 9. No. 2 September 2016	Persamaan penelitian ini adalah kriteria calon penerima bantuan.	Perenelitian ini adalah menggunakan metode pembobotan serta uji rancangan.
6	Neti Erwandari yang berjudul “Implementasi <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Provinsi Riau”. jurnal ilmu hubungan internasiionall volume 5. No. 3 2017	Persamaan dalam penelitian ini adalah peneliti membahas masalah implementasi SDGs, jenis penelitian menggunakan kualitatif deskriptif.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah penggunaan data berupa data sekunder, kemudian teknik pengumpulan data menggunakan tinjauan pustaka (<i>library research</i>)
7	Ishartono dan Santoso Tri Raharjo yang berjudul “ <i>Sustainable Development Goals</i> Dan Pengentasan	Persamaan dalam penelitian ini adalah mentiadakan	Perbedaan dalam penelitiann ini adalah pada jenis penelitian. Yaitu

	Kemiskinan”. Jurnal pekerjaan sosial volume 6. No. 2 2015	segala bentuk kemiskinan sesuai tujuan nomor 1 SDGs, penanggulangan kemiskinan di desa tertinggal.	peneliti memfokuskan pada data jumlah penduduk miskin dan bagaimana peran SDGs di Indonesia dalam mengentaskan.
8	Rizki Priyo Atmoko, Mardiyono, Sukanto yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Menciptakan Perumahan Layak Huni” (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata ruang, Kabupaten Sidoarjo)	Persamaan dalam penelitian ini adalah pada jenis penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kemudian persamaan lainnya adalah peran pembangunan perumahan menjadi perumahan layak huni.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian, tujuan penelitian.

B. Landasan Teori

1. Kemiskinan dan Indikator Yang Mempengaruhi

Menurut Ravallion kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga

tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. (Ritonga, 2003:1)

Menurut Nugroho dan Dahuri kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif di mana kedua kata tersebut menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat seperti sebab-sebab natural, kultural, dan struktural. Topologi kemiskinan juga dikategorikan pada empat kategori yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural (Edi Suharto, 2008: 17-18).

a) Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut pada umumnya dilihat dari beberapa aspek konkrit dengan membuat suatu ukuran tertentu. Kemudian hasil dari ukuran tersebut berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup dasar manusia yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Masalah penanggulangan kemiskinan perlu menjadi konstitusi UUD 1945 yang secara eksplisit dapat memberikan

amanat kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak warga Negara (Karmanis, Tri Lestari. Jurnal Ilmiah vol 1 tahun 2014).

b) Kemiskinan relatif

Kondisi kemiskinan biasanya juga dapat disebut dengan kemiskinan relatif. Yaitu kemiskinan yang dirumuskan dari *the idea of relatif standart*, maksudnya adalah dengan memfokuskan dimensi berupa tempat dan waktu. Jadi pendapat tersebut dimaksudkan bahwa kejadiana kemiskinan di suatu daerah belum pasti akan berpengaruh di daerah lainnya dan juga belum pasti menjadi kemiskinan di masa yang akan datang. Rancangan demikian biasanya diukur dengan mempertimbangkan terhadap kondisi masyarakat dan juga berdasar kepada derajat kelayakan hidup.

c) Kemiskinan kultural

Kemiskinan kulutural merupakan kemiskinan pada bidang sikap, nilai orientasi sosial budaya, gaya hidup, atau pun masyarakat yang tidak sesuai dengan etos kemajuan atau yang biasa disebut dengan masyarakat modern. Beberapa contoh mengenai kemiskinan kultural ini dapat dicontohkan pada orang yang bersikap malas, serta tidak mempunyai kebutuhan berprestasi, dan tidak memiliki jiwa wirausaha.

d) Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang biasanya disebabkan oleh tidak adilnya suatu struktur organisasi, baik organisasi politik maupun organisasi sosial sehingga menyebabkan mereka tidak dapat mendapatkan sumber penghidupan yang layak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dari tindakan kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Keluarga fakir miskin memiliki ciri seperti tidak dapat memenuhi kebutuhan baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan harta serta rendahnya pendidikan dan kreatifitas seseorang (Soeharto, 2009), yaitu sebagai berikut:

- a) Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar;
- b) Tidak mampu berusaha karena sakit, cacat fisik atau mental;
- c) Tidak mampu berfungsi sosial;

- d) Rendahnya sumber daya manusia;
- e) Rentan terhadap guncangan baik individu maupun massa;
- f) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan;
- g) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lain (seperti kesehatan dan lain-lain);
- h) Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlihat dalam kegiatan dalam masyarakat.

Menurut Houghton dan Kandker (2009) ada empat elemen karakteristik penyebab kemiskinan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Karakteristik Regional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terisolasi terpencil termasuk di dalamnya buruknya infrastruktur dan tertinggal sehingga tidak mampu mengakses pasar dan pelayanan publik. 2. Sumber daya alam termasuk di dalamnya kemampuan lahan dan kualitas tanah. 3. Cuaca termasuk iklim, kondisi lingkungan, dan lainnya. 4. Tata kelola wilayah dan ketidakhormatan manajemen.
Karakteristik Komunitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur (air bersih, jalan, listrik dan lainnya) 2. Distribusi lahan. 3. Akses terhadap barang dan jasa (pendidikan, kesehatan dan lainnya). 4. Struktur sosial dan modal sosial.
Karakteristik Rumah Tangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran rumah.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Rasio ketergantungan (anggota keluarga yang menganggur termasuk yang belum kerja). 3. Jenis kelamin kepala keluarga termasuk yang berusia dini. 4. Asal (tanah, peralatan, alat produksi, rumah dan perhiasan dan lainnya). 5. Pekerjaan dan <i>income</i>. 6. Kesehatan dan pendidikan anggota keluarga.
Karakteristik Individu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia. 2. Pendidikan. 3. Status perkawinan. 4. Suku/daerah.

Pada dasarnya penyebab kemiskinan amatlah beragam tergantung dengan kondisi demografis, sosiografis, dan geopolitik seperti yang disampaikan oleh Coombs (Ahmad 1980) menyebutkan bahwa yang terkait dengan (1) penduduk (2) perumahan (3) pekerjaan (Rustanto, 2015: 4-5).

Kemiskinan merupakan persoalan serius yang harus diselesaikan oleh setiap negara termasuk Indonesia. Beberapa lembaga dan ahli yang menentukan indikator kemiskinan adalah sebagai berikut:

a. Badan Pusat Statistik (BPS)

a) Penduduk miskin

Penduduk miskin yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan awal di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin suatu wilayah diartikan banyaknya penduduk miskin yang terdapat di wilayah tersebut.

b) Garis kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minuman dan makanan yang setara 2100 kallori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan (GK) = Garis Kemiskinan Makanan (GKM) + Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

c) Presentase kemiskinan (Tingkat kemiskinan)

Presentase kemiskinan juga disebut tingkat kemiskinan yang menggambarkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan rumus tertentu yang menggambarkan presentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah dibandingkan jumlah penduduk di wilayah tersebut.

b. World Bank

World Bank atau juga disebut bank dunia, adalah sebuah lembaga keuangan internasional yang fungsinya untuk menyediakan pinjaman terhadap negara-negara berkembang guna memberikan modal. Tujuan utama world bank sendiri adalah untuk menjadi lembaga dalam menurunkan kemiskinan di negara-negara lainnya. Kantor pusat world bank berada di Washington, D.C. Amerika Serikat. Kemiskinan adalah

kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well being*), sedangkan inti permasalahan pada kemiskinan adalah batasan-batasan tentang kesejahteraan itu sendiri.

World bank atau bank dunia menilai kemiskinan dengan beberapa indikator penting diantaranya adalah:

- a) Kepemilikan tanah dan modal yang terbatas
- b) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan
- c) Perbedaan sumber daya manusia dan sector ekonomi
- d) Rendahnya produktivitas
- e) Budaya hidup yang jelek
- f) Tata pemerintahan yang buruk dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan

c. Amartya Sen

Amartya Sen merupakan seorang ekonom dan professor di Trinity College, Cambridge. Lahir di Shantiniketan, Bengal Barat India tahun 1933. Menurut Amartya Sen kemiskinan terjadi akibat perampasan kapabilitas (kebebasan untuk mencapai sesuatu dalam hidup seseorang).

2. Kemiskinan Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang sangat luas cakupannya. Mulai dari mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam hingga perilaku yang didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman

dan rukun Islam. Para ahli ekonomi Islam mengartikannya sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam lingkup syariah.

Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Abdul Mannan (1986) ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.

Kemudian menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya langka yang seirama dengan maqasid (tujuan-tujuan syari'ah), tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat

Jadi ekonomi Islam merupakan ilmu yang sifatnya menyeluruh, mempelajari segala bentuk kehidupan ekonomi mulai dari perilaku manusia hingga pemenuhan kebutuhan. Ekonomi Islam juga mempelajari tentang kemiskinan, dimana kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang selalu ada di setiap negara.

Kemiskinan dalam perspektif Islam ini dilihat sebagai aspek moral dan aspek material (*Economic Development and Sosial Peace in Islam*, Manan (1989)).

Miskin berdasarkan spiritual atau keagamaan merupakan seseorang yang tidak memiliki kekayaan spiritual minimum, misalnya pengetahuan agama dan umum yang dibutuhkan dalam *berubudiyah* dan *bertaqarrub* kepada Allah SWT dengan mengedepankan nilai-nilai *akhlaqul karimah*.

Sedangkan miskin berdasarkan material (ekonomi) adalah orang miskin yang tidak dapat memenuhi keperluan dengan layak seperti makanan, pakaian, rumah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan.

Al-Qardhawi menjelaskan bahwa pandangan Islam tidak dapat dibenarkan bahwa seseorang yang hidup di tengah masyarakat Islam sekalipun *Ahl al-Dzimmah* (warga Negara non-muslim) menderita kelaparan, tidak berpakaian, menggelandang (tidak bertempat tinggal), dan ajaran Islam menyatakan perang terhadap kemiskinan dan berusaha keras untuk membendunginya serta mengawasi kemungkinan yang dapat menimbulkannya.

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan harus segera diselesaikan atau diantisipasi. Al-Qur'an berulang kali menyebutkan masalah kemiskinan adalah suatu pertanda bahwa kemiskinan merupakan problema kehidupan. Untuk itu usaha untuk memberantasnya haruslah dengan mengadopsi pendekatan-pendekatan makro (komprehensif) dan *holistic* yang tidak saja

menuntut partisipasi dan peran aktif golongan miskin, tetapi juga melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

3. Kriteria Rumah Layak Huni

Rumah layak huni dapat diartikan sebagai hunian dengan kondisi ideal, di mana bagian tersebut memiliki kecukupan minimal dalam unsur ruang dan luas ruangan. Kemudian, juga memperhatikan kualitas material pembangunan seperti dinding hingga memenuhi aspek pendidikan bagi siapa pun yang menempatinya.

Hal tersebut di atas maksudnya adalah untuk meminimalisir adanya kesenjangan hunian dan menciptakan lingkungan tempat tinggal yang aman, nyaman, serta menjadi sarana pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi muda.

Rumah layak huni merupakan indikator komposit dari beberapa indikator yaitu air minum layak, sanitasi layak, kecukupan luas lantai bangunan, dan kualitas perumahan (jenis atap terluas, dan sumber penerangan. Ketujuh indikator pembentuk layak huni tersebut, rumah tangga dikategorikan menempati rumah layak huni jika terdapat maksimum dua indikator pembentuk yang kurang baik. sementara itu jika terdapat tiga indikator pembentuk kurang baik maka dikategorikan rumah rawan layak huni. Indikator rumah layak huni dapat berguna untuk mengetahui tingkat kesejahteraan

masyarakat dengan indikasi terpenuhinya kebutuhan dasar perumahan.

Tentunya rumah yang layak huni harus dibarengi dengan rumah yang sehat. Di bawah ini akan disebutkan beberapa syarat rumah yang dikatakan sehat diantaranya:

Persyaratan rumah sehat

1. Memenuhi kebutuhan fisiologis

Rumah yang dapat dikategorikan sehat setidaknya memenuhi kebutuhan fisiologis, seperti pencahayaan, suhu, kebisingan, ventilasi, bahan bangunan, bebas dari factor penyakit.

a) Bahan bangunan

Bahan bangunan sebaiknya tidak terbuat dari bahan yang dapat melepas zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan seperti asbestos dan juga tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh kembangnya mikro organisme pathogen.

b) Ventilasi yang baik

Ventilasi yang baik berukuran 10-20% luas lantai, ventilasi yang baik akan memberikan udara segar dari luar, suhu optimum 22-24°C serta kelembapan 60%.

c) Pencahayaan yang cukup

Memberi kesempatan cahaya matahari masuk yang cukup, minimal cahaya matahari yang masuk 60 lux dan tidak menyilaukan, sehingga cahaya matahari mampu membunuh kuman-kuman pathogen, namun jika cahaya matahari kurang sempurna akan mengakibatkan ketegangan pada mata.

d) Bebas dari kegaduhan dan kebisingan

Tingkat kebisingan maksimal di perumahan adalah 55 dBA, tingkat kebisingan yang ideal di perumahan 40-45 dBA, dampak kebisingan mengakibatkan gangguan kenyamanan, gangguan aktivitas, dan keluhan stress.

e) Kepadatan hunian ruang tidur

Luas ruang tidur minimal 8 m² dan tidak dianjurkan digunakan lebih dari 2 orang tidur dalam satu ruang tidur, kecuali anak dibawah umur 5 tahun.

f) Tersedianya tempat bermain untuk anak-anak

Kesempatan bermain dengan leluasa di rumah dan halaman di lingkungan rumah, kesempatan untuk berkembang baik jasmani maupun rohani dalam pertumbuhannya, menghindari kesempatan bermain di luar rumah, jalanan, atau tempat lain yang sulit diawasi.

2. Memenuhi kebutuhan psikologis
 - a) Kesempatan dan kebebasan untuk kehidupan keluarga secara normal.
 - b) Hubungan serasi antara orang tua dan anak.
3. Memberi pencegahan dan perlindungan terhadap penularan penyakit dan pencemaran.
 - a) Vektor penyakit

Vektor penyakit seperti tikus, kecoa, lalat dan nyamuk tidak bersarang di dalam rumah sehingga dapat mencegah terjadinya penularan penyakit.
 - b) Air

Tersedianya sarana air bersih dengan kapasitas maksimal 60 liter/orang/hari. Penyediaan air bersih harus memenuhi persyaratan kesehatan.
 - c) Limbah

Limbah cair yang berasal dari rumah tidak mencemari air, tidak menimbulkan bau dan tidak mencemari permukaan tanah. Sedangkan limbah padat harus dikelola agar tidak menimbulkan bau, pencemaran terhadap permukaan tanah serta air tanah (Imam Santoso,2015: 13-16) .

Kriteria rumah yang sehat adalah mencukupi kebutuhan ruang per orang yang didasarkan dari kegiatan dasar manusia di

dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut mulai dari tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang. Rumah sederhana yang sehat memungkinkan penghuni untuk hidup layak dan sehat serta dapat menjalankan aktivitas hidup sehari-hari dengan layak. klasifikasi rumah sehat dan nyaman dibagi menjadi 3 aspek meliputi pencahayaan, penghawaan, dan suhu udara dan kelembapan dalam ruangan. Ketiga aspek tersebut merupakan dasar atau kaidah perencanaan rumah sehat dan nyaman.

1. Pencahayaan

Matahari sebagai potensi terbesar yang dapat digunakan sebagai pencahayaan alami pada siang hari. Yang dimaksud dengan pencahayaan adalah penggunaan cahaya dari luar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Cuaca dalam keadaan cerah dan tidak berawan
- b) Ruang mendapatkan cukup banyak cahaya
- c) Ruang kegiatan mendapatkan distribusi cahaya secara merata

2. Penghawaan

Udara merupakan komponen penting dalam kebutuhan pokok manusia untuk bernafas sepanjang hidupnya. Untuk itu udara sangat berpengaruh dalam menentukan kenyamanan rumah. Karena kenyamanan akan memberikan kesegaran terhadap penghuni dan menciptakan rumah yang sehat. Untuk

menciptakan rumah yang sehat sebaiknya setiap rumah memiliki ventilasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Lubang penghawaan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai ruangan.
- b) Udara yang mengalir masuk sama dengan volume udara mengalir keluar ruangan.
- c) Udara masuk tidak berasal dari asap dapur atau bau kamar mandi/WC.

3. Suhu udara dan kelembaban

Rumah dapat dikatakan sehat dan nyaman apabila suhu udara dan kelembaban ruangan sesuai dengan suhu tubuh manusia normal. Oleh karena itu suhu udara dan kelembaban ruangan sangat dipengaruhi oleh penghawaan dan pencahayaan. Jika penghawaan kurang atau tidak lancar akan menimbulkan ruangan yang pengap atau sumpek dan akan menimbulkan kelembaban yang tinggi. Maka dari itu untuk mengatur suhu udara dan kelembaban yang normal untuk ruangan dan penghuni dalam melakukan aktivitasnya harus memperhatikan:

- a) Keseimbangan penghawaan antara volume udara yang masuk dan keluar.
- b) Pencahayaan yang cukup pada ruangan dengan perabotan tidak bergerak.

- c) Menghindari perabotan yang menutupi sebagian besar luas lantai ruangan (Wita Kristiana, *Jurnal ISSN*, 1, Juli 2011: 14)

4. BAZNAS dan Program-programnya

1. Sejarah BAZNAS Indonesia

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

2. Visi dan Misi BAZNAS

a) Visi

Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia.

b) Misi

- 1) Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional.
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional.
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- 4) Menerapkan system manajemen keuangan transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5) Menerapkan system pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional.
- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat.
- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia.
- 8) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*.
- 9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

Mengenai Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Dalam pasal 1:

- a) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
 - b) Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang dibentuk Menteri Agama Republik Indonesia yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat provinsi.
 - c) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS kabupaten/kota adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
 - d) Unit pengumpul zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, Baznas Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu mengumpulkan zakat.
3. Sejarah BAZNAS Kabupaten Kulon Progo

Baznas kabupaten Kulon Progo sendiri dibentuk pada tanggal 3 oktober 2009 berdasarkan keputsan Bupati Kulon Progo Nomor: 269 Tahun 2009 tentang Pembentukan BAZDA Kabupaten Kulon Progo masa bakti tahun 2009 sampai dengan

2012. Setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI No 14 Tahun 2014, mengenai pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011, BAZDA berubah nama menjadi BAZNAS.

Berdasarkan SK Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/ 568 Tahun 2014 Tanggal 5 Juni 2014 ditetapkan pembentukannya sebagai BAZNAS Kabupaten yang merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

4. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kulon Progo

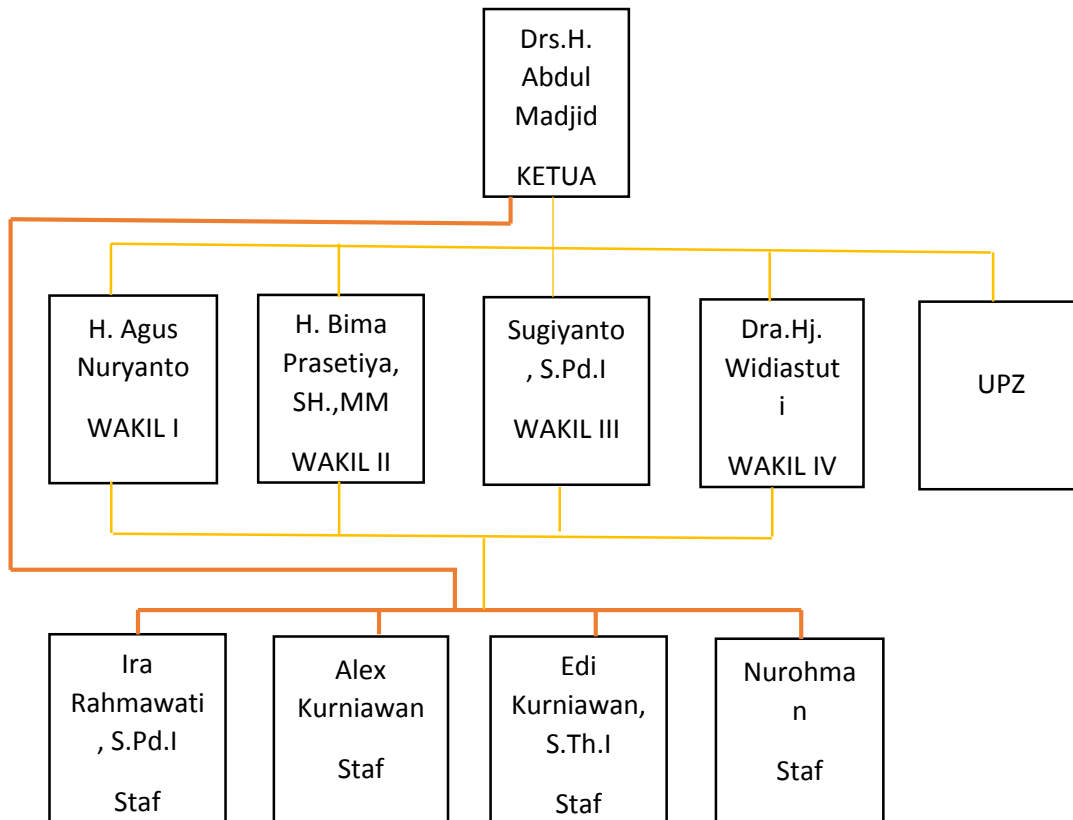
a) Visi

Menjadi pengelola zakat yang professional, efektif, efisiensi dan terpercaya di Kabupaten Kulon Progo.

b) Misi

- 1) Mengkoordinasi LAZ dan UPZ tingkat Kabupaten Kulon Progo dalam mencapai target nasional;
- 2) Mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS;
- 3) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel;
- 4) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat Kabupaten Kulon Progo melalui sinergi umat;
- 5) Terlibat aktif dalam gerakan ZIS di Kabupaten Kulon Progo;

6) Menjalinkan kerjasama dengan pemerintah dan instansi terkait.



Sumber: BAZNAS Kabupaten Kulon Progo

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kulon Progo

Hingga saat ini Baznas Kulon Progo memiliki lima program dan sembilan produk.

Program Baznas Kulon Progo:

a. Kulon Progo Taqwa

- 1) Bantuan insentif ustadz TPA/Madin/PP/Majlis Taklim
- 2) Bantuan kegiatan keagamaan
- 3) Bantuan majlis taklim

- 4) Bantuan pembangunan Masjid/PonPes/Panti Asuhan
- 5) Bantuan mualaf
- b. Kulon Progo Cerdas
 - 1) Bantuan biaya Pendidikan/Skripsi
 - 2) Bantuan honor GTY/GTT (Paud/RA/TK/SD/MI dari Yayasan Islam)
- c. Kulon Progo Makmur
 - 1) Bantuan modal usaha untuk KK Miskin
- d. Kulon Progo Sehat
 - 1) Bantuan biaya Berobat/Transportasi pengobatan
 - 2) Bantuan Jambanisasi
- e. Kulon Progo Peduli
 - 1) Bantuan bedah rumah
 - 2) Bantuan korban bencana
 - 3) Bantuan biaya hidup bagi lansia
 - 4) Bantuan ibnu sabil
 - 5) Bantuan bakti sosial
 - 6) Bantuan tunjangan hari raya
 - 7) Bantuan aladin (Atap Lantai dan Dinding)

Sedangkan produk-produk Baznas Kulon Progo diantaranya:

- a. Zakat Peternakan
- b. Zakat Pertanian
- c. Zakat Emas Perak dan Uang

- d. Zakat atas Madu
- e. Zakat Perniagaan
- f. Zakat Harta Galian
- g. Zakat Profesi
- h. Zakat Saham dan Obligasi
- i. Zakat Investasi

5. Sustainable Development Goals (SDGs) dan 17 Tujuannya

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program lanjutan dari berakhirnya MDGs pada tahun 2015. Berawal dari tujuan pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang telah dilaksanakan selama periode 2000-2015 memang telah membawa berbagai kemajuan. Sekitar 70 persen dari total indikator yang mengukur target MDGs telah berhasil dicapai oleh Indonesia. Akan tetapi, beberapa indikator yang mengukur target di bidang kesehatan masih cukup jauh dari capaian dan harus mendapatkan perhatian khusus. Target yang belum tercapai di antaranya adalah tingkat kemiskinan nasional.

SDGs pertama menggunakan berbagai sudut pandang untuk menggambarkan kemiskinan, dan karenanya membutuhkan berbagai tanggapan yang terkoordinasi. Kemudian bila dilihat dari tujuan SDGs kesebalas yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan menegaskan bahwasannya perlu adanya pembenahan lingkungan dalam hal permukiman yang mengerucut pada tempat

tinggal. Dua tujuan SDGs yang pertama dan sebelas memiliki kaitan yang sama-sama penting. Seperti telah dijelaskan di atas menurut BPS salah satu indikator kemiskinan adalah kepemilikan rumah yang layak. Pemerintah pada tahun 2030 ingin mencapai target menjamin akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan kondisi permukiman kumuh. Salah satu tujuan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam agenda SDGs di Indonesia yaitu pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk menghapus segala bentuk kemiskinan selama 15 tahun ke depan. Target yang ingin dicapai pada tahun 2030 ini mensyaratkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki akses terhadap pelayanan dasar dan memiliki hak untuk menikmati suatu standar kehidupan yang layak serta pemerintah harus dapat menjamin masyarakat yang sangat miskin dengan suatu program jaminan sosial. (Ali Said, dkk. 2016: 3)

Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki 17 tujuan dan tujuan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota dan Komunitas Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Laut
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh
17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Zaki (2015:3) Menilik dari 17 program tersebut, maka dalam pelaksanaannya di era pemerintahan Joko Widodo melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan *Sustainable Development Goals* dengan mengadopsi hasil kesepakatan *Sustainable Development Goals* melalui prinsip Nawa Cita yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Negara (RPJMN) 2015. Nawa cita merupakan visi dari Presiden Joko widodo yang merupakan refleksi dari pemikiran Trisakti Presiden Soekarno. Menurut Warsito Raharjo Nawa cita sebagai pondasi utama dalam mereformasikan kembali pembangunan di Indonesia, karena pembangunan sekarang

mengacu pada pertumbuhan ekonomi sehingga menimbulkan perbedaan antar wilayah.

Komitmen pemerintah mengenai pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah dimulai dari presiden-presiden sebelumnya. Komitmen tersebut ditandai dengan komitmen pemerintah melanjutkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang digariskan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 serta program-program pemerintah lainnya. Program tersebut berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta lingkungan serta pemeliharaan daya dukung guna membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.(Abdoellah, 2016)

Program-program dalam mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* didokumentasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dan disusun sejak tahun 2014 dan sampai saat ini banyak target *Sustainable Development Goals* sudah tercakup dalam prioritas pembangunan nasional. Dari sebanyak 169 target yang ada pada SDGs, sekitar 96 target telah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Hal itu digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.6 Prioritas Nasional dan Target RPJMN Sesuai Dengan Target SDGs

Pilar/Goal SDGs	Target Global	Target RPJMN 2014-2019	Prioritas Nasional
Ekonomi (7,8,9,10,17)	54	30	<ul style="list-style-type: none"> - Kedaulatan Energi - Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional - Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja - Membantu Konektivitas Nasional - Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah - Pelaksanaan Politik LN bebas aktif
Sosial (1,2,3,4,5)	47	27	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggulangan Kemiskinan - Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat - Peningkatan Kedaulatan Pangan - Pelaksanaan Program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat - Melindungi anak perempuan dan kelompok marjinal
Lingkungan (6,11,12,13,14,15)	56	31	<ul style="list-style-type: none"> - Ketahanan air - Membangun Perumahan Dan Kawasan Permukiman - Penanganan Perubahan Iklim Dan Penyediaan Informasi Iklim Dan Kebencanaan Serta Pengurangan Emisi Karbon - Pengembangan Ekonomi Maritime Dan Kelautann - Pelestarian Sda, Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana

			- Rencana Aksi Dan Strategi Keanekaragaman Hayati Indonesia
Hukum dan Tata Kelola (16)	12	8	- Meningkatkan Kualitas Perlindungan WNI - Peningkatan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan - Membangun Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Total	169	96	

Sumber: Sekertariat SDGs 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat pilar ekonomi mencakup tujuan 7,8,9,10, dan 17 dengan 54 target dari poin SDGs. Sedangkan dalam agenda nasional sebanyak 30 target telah sejalan dengan agenda prioritas nasional. Kemudian pada pilar sosial mencakup 5 tujuan yaitu 1,2,3,4, dan 5 dengan 27 target dari poin SDGs dan dalam agenda nasionalnya hanya sebanyak 27 target yang selaras dengan RPJMN. Pada pilar lingkungan mencakup tujuan 6,11,12,13,14, dan 15 dengan 56 target dan sebanyak 31 target yang diakomodasikan dalam agenda pembangunan nasional. Dan selanjutnya pilar hukum dan tata kelola dengan 1 tujuan yakni tujuan 16 dengan memuat 12 target, sebanyak 8 target SDGs sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. (BPS. 2017)

Salah satu pencapaian pembangunan SDGs adalah membangun perumahan dan kawasan permukiman. Yang dalam penerapannya oleh lembaga filantropi BAZNAS Kulon Progo dilakukan dengan memberikan

bantuan bedah rumah terhadap masyarakat miskin yang sudah tercatat dan berhak menerima.